

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Arifin, B. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Hanani, N. (2012). *Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan Keluarga*. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.
- Koentjaraningrat. (1961). *Some Social-Anthropological Observations On Gotong Royong Practices In Two Villages Of Central Java*. Ithaca, NY: Southeast Asia Program, Departement of Far Eastern Studies, Cornell University.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2018). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Nucholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nuhung, I. A. (2013). *Membangun Pertanian: Masalah, Kendala, dan Solusi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pasandaran, E., Syakir, M., & Yufdy, M. P. (Ed.). (2018). *Sinergi Inovasi Sumber Daya Dan Kelembagaan Menuju Kesejahteraan Petani*. Jakarta: IAARD Press.
- Ridlwan, Z. (2014). *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam*

Pembangunan Perekonomian Desa. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarno. (2014). *Teknologi dan Inovasi dalam Ketahanan Pangan Nasional*. Bogor: IPB Press.

Sururi, M. P., Hafidh, Z., & Afifah, D. A. (2023). *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis Dan Model Implementasi Kebijakan Edwards III*. Kota Malang: Indonesia Emas Group

Subarso, A. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf, A. M. (2025). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., Ode, S., & Regif, S. Y. (2023). Network governance dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 63-70.

Amalia, D., Rochim, A. I., & Rahmadanik, D. (2024). Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) guna menunjang pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(2), 125-131.

Elpiana Manullang & Restu Rahmadani. (2023). Implementasi kebijakan Dana Desa dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal*

Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 4(2), 87–101.

Fanani, A. F. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Menanggulangi Dampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Ngawi. *Journal of Governance Innovation*, 4(1), 46–64.

Kumala, R. I. (2022). Analisis pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 45–58.

Musfirah, A., Sobirin, S., & Mandala, S. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(3), 686–707.

Padila, C. (2025). Peran sektor pertanian dalam mendukung ketahanan ekonomi di era globalisasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(1), 15–21.

Rahayu, R., Anwar, F., Kasman, & Darmi, T. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(1)

Ramadani, D., & Febrianti, R. (2023). Partisipasi aktor lokal dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 89-98.

Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1), 1-12.

Rukoyah, R. S. (2024). Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal kerajinan anyaman pandan melalui KUBE Sakinah di Desa Kadulimus Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 9–15.

Sipayung, B. P., Fobia, T., Taena, W., & Joka, U. (2021). Model Pengelolaan Dana

Desa Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(2), 135–148.

Sutaryo. (2021). Reformasi pemerintahan desa dan tantangan implementasi otonomi. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 15-25.

Sutangsa, S., & Suryana, E. (2023). Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Subang: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 330–342.

Wahyudin, W., Kuswana, D., & Herdiana, D. (2023). Peran pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Tamkin: *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 63–82.

Dokumen & Peraturan:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan. (2025). Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Angka 2025 (Vol. 22).

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023. (2023).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. (2024). Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2023. (2022). Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (2021). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2013). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

